

## Wacana Media Kumparan atas Pembebasan Lahan Tol Solo-Jogja

Fiphan Septian Refdi<sup>1</sup>, Aisyah Herlita Setyaningrum<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Indonesia

fiphan.septian@ui.ac.id

### ABSTRAK

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol kerap menimbulkan konflik sosial, ketimpangan kompensasi, dan marginalisasi masyarakat terdampak, namun media arus utama sering membingkai isu tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan menguntungkan. Penelitian ini menganalisis pemberitaan Kumparan mengenai pembebasan lahan pembangunan jalan tol Solo-Jogja dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Data penelitian berupa 16 artikel berita yang seluruhnya merupakan publikasi Kumparan terkait isu ini pada dua fase utama perencanaan (2019-2020) dan pelaksanaan (2022-2024) yang ditelaah melalui dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kumparan tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mereproduksi struktur kuasa melalui mekanisme agenda setting dan praktik kapitalisme media. Narasi pembangunan ditampilkan sebagai progresif dan tidak terbantahkan, sementara suara masyarakat terdampak dimarginalisasi dan konflik sosial disamarkan di balik retorika pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, media berperan sebagai agen ideologis yang memperkuat hegemoni pembangunan dan kepentingan dominan. Penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan bagaimana agenda setting dan kapitalisme media membentuk wacana pembangunan digital di Indonesia, melengkapi penelitian terdahulu tentang konflik agraria dengan menyoroti keterkaitan antara kepemilikan media, praktik diskursif, dan reproduksi ideologi pembangunan, serta membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai resistensi wacana dari aktor lokal maupun media alternatif.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis; Fairclough; Pembebasan Lahan; Jalan Tol Solo-Jogja; Kumparan

### ABSTRACT

*Land acquisition for toll road development projects often generates social conflict, unequal compensation, and marginalization of affected communities, yet mainstream media frequently frame these issues as natural and beneficial. This study analyzes Kumparan's coverage of the land acquisition for the Solo-Jogja toll road using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. The data consist of 16 news articles, representing all Kumparan publications related to this land acquisition issue in two main phases planning (2019-2020) and implementation (2022-2024) examined across the dimensions of text, discourse practice, and social practice. The findings reveal that Kumparan does not merely convey information but also reproduces power structures through agenda setting mechanisms and media capitalism practices. Development is represented as progressive and unquestionable, while the voices of affected communities are marginalized and social conflicts are concealed behind the rhetoric of economic growth. In this way, the media function as ideological agents that reinforce development hegemony and serve dominant interests. This study contributes by demonstrating how agenda setting and media capitalism shape digital development discourse in Indonesia, complementing previous research on agrarian conflicts by highlighting the interconnection between media ownership, discursive practices, and*

*the reproduction of development ideology, while also opening avenues for further inquiry into discursive resistance from local actors and alternative media.*

**Keywords:** Critical Discourse Analysis; Fairclough; Land Acquisition; Solo-Jogja Toll Road; Kumparan

## A. PENDAHULUAN

Isu pembebasan lahan menjadi perhatian media di berbagai belahan dunia. Di India, pemberitaan mengenai akuisisi lahan, termasuk soal kompensasi dan kehilangan lahan, masih kurang terstruktur dan kerap mengabaikan persoalan jangka panjang, seperti menurunnya kondisi hidup di lokasi pemukiman baru, hilangnya mata pencaharian, dampak sosial negatif, serta ketidakseimbangan kekuasaan (Sen Sharma & Jothiprakash, 2024). Sementara itu di Kanada, terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pembebasan lahan. Media masyarakat adat cenderung mengaitkan isu-isu tata kelola lahan dengan masalah kontemporer, seperti rasisme dan pengawasan terhadap kesejahteraan anak, serta kolonialisme historis dan hubungan antara masyarakat adat dan pendatang. Sebaliknya, media korporasi sering mengecualikan konteks tersebut dari pemberitaan (Harding & Ray, 2022).

Penggiringan opini oleh media juga terjadi di Afrika Selatan. Beberapa media, seperti Business Day dan Daily

Maverick, menyoroti potensi dampak negatif penyitaan tanah oleh negara untuk kepentingan umum, termasuk ketakutan akan hilangnya investasi dan instabilitas ekonomi, sementara penerima manfaat kurang mendapat sorotan (Adebayo, 2019). Di Amerika Serikat, pemberitaan tentang Bears Ears National Museum menunjukkan adanya penghapusan dan pergeseran narasi masyarakat adat secara berulang, sedangkan media lokal lebih berfokus pada kepentingan pendatang dengan mengklasifikasikan lahan sebagai aset, sehingga diskursus politik para pemukim mendominasi perdebatan (Ricketts, 2024). Penelitian eksperimental melalui survei di Australia menunjukkan bahwa semakin kuat unsur konflik dalam pemberitaan, semakin tinggi pula potensi penolakan publik terhadap perubahan penggunaan lahan, sehingga opini masyarakat sangat dipengaruhi oleh penonjolan isu tertentu dalam media (Colvin et al., 2020).

Di Indonesia, khususnya untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas media ramai memberitakan konflik pembebasan lahan ini sebagai kesadaran akan permasalahan lingkungan hidup (Eriza Reziana & Alex Sobur, 2023). Selanjutnya dalam studi Romadlan & Fauziah (2022) terdapat perbedaan pembedaan citra polisi yang diangkat oleh CNN Indonesia dan Kompas.com dalam mengonstruksi peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian di desa Wadas, Jawa Tengah. Kompas.com menggunakan diksi "pengamanan", sedangkan cnnindonesia.com menggunakan diksi "represif". Pemberitaan media selanjutnya dalam konteks pembangunan bandara YIA, media daring menyoroiti adanya terdapat perbedaan konstruksi realitas, di mana Tirto.id melihat dari warga yang terdampak, sedangkan Medcom.id dari sisi keuntungan dan manfaat setelah dilakukan pengosongan lahan (Faujiah & Rubiyanah, 2020).

Berdasarkan hasil studi tentang pemberitaan media di berbagai negara terkait pembebasan lahan tersebut di atas, menunjukkan kecenderungan pemberitaan media mengenai

masyarakat sebagai kelompok yang lemah dan mengalami dampak sosial jangka panjang. Dampak tersebut mencakup hilangnya mata pencaharian, kompensasi yang tidak sesuai, kehilangan hak atas tanah yang telah lama mereka tempati, hingga munculnya isu diskriminasi, termasuk rasisme, terhadap kelompok tertentu yang terkena dampak langsung dari kebijakan pembebasan lahan.

Kekuatan media massa terletak pada kemampuannya mengarahkan opini publik, menjadikannya senjata strategis dalam perebutan citra (Foucault, 2002). Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui narasi yang dikonstruksinya. Penelitian oleh (Dhamayanti et al., 2024) menunjukkan bahwa media memiliki posisi strategis dalam mengonstruksi realitas sosial melalui pembedaan suatu berita. Studi tersebut mengungkapkan bahwa perbedaan dalam cara media menyajikan informasi dapat memengaruhi bagaimana publik memahami suatu isu, termasuk kebijakan pemerintah seperti relokasi ibu kota negara Indonesia.

Dalam hal kebijakan pemerintah terkait pembangunan jalan tol Solo-Jogja, media memiliki peranan dalam mengonstruksikan suatu wacana. Jalan tol Solo-Jogja merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total panjang 96,57 km yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Arnani, 2024). Dalam konteks pembebasan lahan jalan tol Solo-Jogja, terdapat berbagai kendala seperti adanya eksistensi makelar tanah, ketidaksesuaian nilai uang ganti rugi, dan proses pembayaran yang bermasalah (Roro & Zahra, 2024) banyak sertifikat yang masih diagunkan, hingga konflik antara ahli waris (Winarda et al., 2021). Dengan kompleksitas permasalahan dalam proses pembebasan lahan jalan tol Solo - Jogja, penting memahami bagaimana media mengeksplorasi bahasa dalam membentuk wacana dan menciptakan realitas sosial.

Tujuan dari analisis wacana kritis, menurut Fairclough (1995), adalah untuk mengkaji hubungan kausalitas dan komitmen/agenda tersembunyi dengan melihat praktik diskursif, peristiwa, dan teks, dan struktur

hubungan sosial, budaya, dan proses dalam skala yang lebih luas, guna memahami bagaimana praktik, peristiwa, dan teks tersebut muncul dan secara ideologis berhubungan dengan relasi antara wacana dan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis wacana kritis mengkaji bahasa sebagai praktik sosial yang tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan ideologi Wodak (2015). Berbeda dengan analisis wacana konvensional yang cenderung berfokus pada struktur tekstual, analisis wacana kritis memandang wacana sebagai manifestasi dari konstruksi sosial yang lebih luas, di mana bahasa dipahami sebagai instrumen yang membentuk dan dibentuk oleh realitas sosial (Van Dijk, 2015). Dalam perkembangannya, telah muncul beberapa model teoretis analisis wacana kritis yang menawarkan kerangka analisis berbeda namun memiliki pada tujuan yang sama, yaitu mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam praktik kebahasaan. Di antara model-model tersebut, tiga pendekatan telah mendominasi kajian analisis wacana kritis: model sosio-kognitif Teun A. van Dijk, pendekatan diskursif-historis Ruth Wodak, dan

kerangka tiga dimensi Norman Fairclough.

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan analisis wacana kritis dengan model yang berbeda. (Imamul Huda et al., 2025) menganalisis propaganda ancaman politik identitas pada teks pidato Jokowi, hasil penelitian menunjukkan bahwa propaganda Jokowi terlihat lewat adanya name calling melalui penggunaan majas metonimia untuk politik identitas berupa politisasi SARA dan politisasi agama. Yu et al. (2024) meneliti bagaimana media berita berbahasa Inggris di Tiongkok membangun wacana resistensi terhadap perubahan iklim menggunakan pendekatan historis-wacana Wodak. Dari analisis terhadap 82 artikel, ditemukan tiga tema utama: perubahan iklim sebagai musuh global, Tiongkok sebagai pemimpin dalam penanganan perubahan iklim, dan negara lain sebagai sekutu Tiongkok. Penelitian oleh Sutikno et al. (2025) menganalisis bagaimana bahasa dalam iklan GoSend di YouTube memengaruhi persepsi dan perilaku konsumen dengan menggunakan pendekatan Fairclough, yang menekankan analisis teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik

sosial-budaya (makro), temuan studi tersebut bahwa pemilihan bahasa yang menarik dalam iklan GoSend di YouTube mampu memengaruhi persepsi dan perilaku konsumen, dengan menyoroti pentingnya penggunaan bahasa yang menarik, pemilihan visual yang tepat, dan pemilihan platform yang efektif untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong penggunaan layanan.

Setiap model analisis wacana menawarkan sudut pandang yang khas dalam memahami bagaimana wacana berperan dalam membentuk realitas sosial dan politik. Pendekatan Van Dijk memusatkan perhatian pada keterkaitan antara struktur wacana dan proses kognitif, menunjukkan bagaimana wacana mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persepsi, ingatan, serta representasi mental individu. Sementara itu, Wodak melalui pendekatan historis-wacana, menyoroti pentingnya latar belakang historis dan sosial dalam pembentukan makna wacana. Di sisi lain, Fairclough memberikan kerangka kerja yang komprehensif dengan menekankan hubungan antara teks, praktik produksi wacana, dan konteks sosial-budaya yang

lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab bagaimana Kumparan membentuk wacana pembebasan lahan pembangunan jalan tol Solo-Jogja melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough, khususnya pada dimensi mikro, meso, dan makro. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana pilihan bahasa, strategi produksi wacana, serta konteks sosial-politik bekerja secara simultan dalam mereproduksi hegemoni pembangunan dan kepentingan dominan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Media Framing

*Framing* merujuk pada proses seleksi, penekanan, dan penyajian aspek-aspek tertentu dari realitas dalam teks media, yang bertujuan membentuk pemahaman publik terhadap suatu isu atau peristiwa (Entman, 1993). Dijelaskan bahwa *framing* merupakan mekanisme komunikasi yang melibatkan pemilihan elemen-elemen tertentu dari realitas yang dipersepsikan, lalu menonjolkannya dalam sebuah pesan untuk mendukung definisi masalah tertentu, memberikan interpretasi kausal, evaluasi moral, atau

rekomendasi tindakan. Dalam konteks ini, media memiliki peran aktif dalam mengonstruksi realitas sosial melalui proses penyajian pesan yang terstruktur.

Pan & Kosicki (1993) mengembangkan pemahaman konsep *framing* dengan mengintegrasikan pendekatan kognitif, konstruktivis, dan kritis. Mereka melihat *framing* tidak hanya sebagai konten atau pesan yang disampaikan, tetapi juga sebagai strategi pembentukan wacana berita dan proses penerimaan oleh audiens. Penekanan mereka pada aspek produksi dan resepsi berita menunjukkan bahwa *framing* merupakan hasil interaksi kompleks antara praktik jurnalistik, konstruksi sosial atas realitas, dan interpretasi audiens terhadap pesan yang disajikan (Reese, 2007).

Selanjutnya, D'Angelo (2002) mengidentifikasi tiga paradigma utama yang digunakan dalam penelitian *framing*, yakni paradigma kognitif, kritis, dan konstruksionis. Paradigma kognitif fokus pada bagaimana *frame* memengaruhi pemahaman dan interpretasi audiens secara individual. Paradigma konstruksionis menyoroti bagaimana *frame* muncul dari proses

interaksi sosial, sedangkan paradigma kritis, yang paling relevan untuk analisis wacana kritis, menekankan bahwa *frame* berita sering kali dibentuk oleh kepentingan elit atau kelompok dominan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan atau status quo (D'Angelo, 2002). Perspektif ini sejalan dengan Fairclough (1995), yang menekankan bahwa media secara aktif berperan dalam mereproduksi hubungan kekuasaan melalui praktik diskursif yang mencerminkan serta mengukuhkan struktur sosial dominan.

Adapun beberapa hasil penelitian yang menggunakan teori *framing* diberbagai belahan dunia sebagai berikut, studi mengenai wabah cacar monyet menemukan adanya perbedaan signifikan dalam strategi *framing* antara media arus utama yang cenderung menggunakan bingkai naratif dan deskriptif, dengan media sosial yang lebih menonjolkan bingkai interaktif dan dinamis. Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap pembentukan persepsi publik selama krisis kesehatan (Yang, 2024). Penelitian lain terkait COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan variasi *framing*, di mana Detik.com lebih menekankan pada aspek manajemen

pandemi, sedangkan Liputan6.com menyoroti narasi alternatif krisis. Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana *framing* media berperan dalam membentuk pemahaman publik dan menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang transparan (Setiawan et al., 2024).

Dalam isu lingkungan, liputan media Mesir pada COP27 menekankan tantangan dan peluang keberlanjutan dengan fokus pada kelangkaan air, pertanian berkelanjutan, dan kerja sama regional, yang berpengaruh pada persepsi publik dan diskursus kebijakan (Radwan et al., 2025). Sementara itu, dalam konteks politik dan sosial, penelitian tentang liputan vaksin COVID-19 Tiongkok memperlihatkan perbedaan bingkai antara media Tiongkok yang menekankan kerja sama dan barang publik, serta media Amerika yang lebih menonjolkan konflik dan skeptisisme, sehingga berdampak pada citra nasional dan opini global (Ju et al., 2023). Studi lain mengenai kebijakan imigrasi Jepang di media Amerika Serikat menunjukkan bahwa media konservatif membingkai isu imigrasi secara negatif, sedangkan baik media konservatif maupun liberal tetap

menekankan tema sejarah dan komunitas, yang akhirnya memengaruhi wacana publik dan menyoroti tanggung jawab etis media dalam isu imigrasi (Li & Shen, 2025).

## **2. Agenda Setting**

*Agenda Setting* dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 yang menekankan bahwa media tidak sekadar mencerminkan realitas tetapi secara aktif menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui intensitas dan pola pemberitaan. Oleh karenanya, agenda setting merupakan salah satu fungsi utama media, yang menjadikan media berperan penting dalam ranah publik (Zheng et al., 2023).

Teori *Agenda Setting* memiliki tiga prinsip utama, yakni kemampuan media untuk menyeleksi isu penting, penguatan ingatan melalui repetisi, dan pembentukan persepsi kepentingan yang bekerja secara simultan dan saling menguatkan dalam proses komunikasi massa (M. E. McCombs et al., 2014).

Teori ini dianggap memiliki kelengkapan yang komprehensif karena menyajikan kerangka efek media yang berfokus pada tingkat kepentingan, menggunakan pendekatan yang

menekankan pengaruh tanpa mengubah sikap, serta menyediakan metode yang memungkinkan efeknya diteliti, diuji, dan, sebagaimana semakin terbukti, dapat dibuktikan secara empiris (Perloff, 2022). Oleh karenanya, *agenda setting* telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi politik, reputasi korporasi, dan studi media sosial (Idid, 2017; Carroll, 2024; Khan et al., 2025).

## **3. Kapitalisme Media**

Kapitalisme media mengacu pada keterkaitan antara media dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana media memainkan peran penting dalam mempromosikan konsumerisme, menciptakan sikap pro-kapitalis, serta menyembunyikan aspek-aspek negatif dari kapitalisme (Klikauer, 2022). Industri media memainkan peran penting dalam mendorong globalisasi yang tidak merata serta mempromosikan narasi-narasi tanpa kritik terhadap ekonomi pasar dunia (Lule, 2018). Cara produksi kapitalis menjadi pendorong utama tindakan strategis perusahaan-perusahaan media serta transformasi struktural dalam ekonomi media (Knoche, 2019).



Kapitalisme media mendorong pemindahan penonjolan isu dari agenda media ke agenda publik, memengaruhi isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat (Carroll & McCombs, 2003; M. McCombs, 2015; Valenzuela & McCombs, 2019). Perhatian media yang positif dapat meningkatkan citra publik perusahaan, sementara pemberitaan negatif dapat merusaknya (Carroll, 2010). Hubungan ini kompleks dan dapat berbeda tergantung pada sifat dan nada pemberitaan tersebut (Qin et al., 2020).

Liputan media dapat berdampak langsung pada pasar keuangan, sebagai contoh, selama krisis seperti tumpahan minyak BP, narasi media memengaruhi reaksi pemangku kepentingan dan perilaku pasar (Kleinnijenhuis et al., 2015). Demikian pula, unggahan media sosial oleh tokoh berpengaruh selama pandemi COVID-19 memengaruhi harga saham (Wang & Vergeer, 2024).

Posisi media dalam bidang pasar, bersama dengan identitas pemiliknya, dikaitkan dengan pilihan pasar tertentu serta prioritas terhadap satu pasar dibandingkan pasar lainnya, yang berdampak pada ketegangan antara koalisi dengan logika yang saling

bersaing (Sanders & van de Vrande, 2025). Keterkaitan ekonomi dengan perusahaan induk sangat memengaruhi pemilihan topik berita kategori "soft news," menyebabkan distorsi ruang publik budaya serta pembatasan terhadap otonomi jurnalistik (Hendrickson & Wilkins, 2009). Pengaruh struktur kepemilikan media, seperti media yang diperdagangkan di pasar saham, media milik swasta, dan media masyarakat sipil, dikaitkan dengan pilihan pasar tertentu dan prioritas yang diberikan terhadap suatu pasar dibandingkan pasar lainnya, sehingga memengaruhi tingkat ketegangan antarkoalisi yang memiliki logika bersaing (Blach-Ørsten et al., 2024).

Peran serta interaksi antara berbagai jenis media dengan elit politik dan kelompok advokasi telah terbukti memengaruhi agenda politik dan media. Media konvensional memainkan peran penting dalam memperkuat penonjolan isu serta mempertahankan perhatian terhadap isu-isu tertentu (Langer & Gruber, 2021). Bidang agenda-setting politik menawarkan tambahan penting melalui investigasi sistematis terhadap peran media dalam

mempromosikan masalah sosial dalam agenda politik. Hal ini memiliki implikasi dalam memahami bagaimana media mendistribusikan kembali kekuasaan antara berbagai aktor atau institusi politik (Thesen, 2014).

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yakni gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan utama pada data kualitatif sebagai fondasi utama analisis, sementara data kuantitatif berfungsi sebagai penunjang untuk memperkuat interpretasi dan temuan. Paradigma penelitian ini adalah kritis dengan metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan strategi penelitian Critical Discourse Analysis (CDA). CDA merupakan suatu bidang yang menganalisis teks tertulis maupun lisan untuk mengungkap ekspresi kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan dalam konteks sosial, politik, dan historis tertentu (Van Dijk, 2015). Critical Discourse Analysis (CDA), yang berakar pada pemikiran Michael Fairclough sejak 1980-an, memperluas pendekatan analisis wacana tradisional dengan menekankan interaksi antara teks,

praktik diskursif, dan konteks sosial-budaya (Fairclough, 1995). CDA bertujuan untuk mengungkap makna-makna tersembunyi di balik teks.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dalam model Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yaitu dimensi teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial (makro). Pada level teks, perhatian difokuskan pada aspek kebahasaan seperti pemilihan kosakata, struktur kalimat, keterpaduan antarkalimat, serta gaya penyampaian dalam teks guna mengungkap konstruksi makna dan penyisipan ideologi tertentu. Selanjutnya, pada dimensi praktik wacana, ditelusuri bagaimana teks diproduksi, disebarluaskan, dan dimaknai oleh berbagai aktor, termasuk peran institusi media, narasumber, serta audiens dalam membentuk dan menyebarkan wacana. Tahapan ini juga mencakup analisis terhadap konteks institusional dan hubungan antarwacana (intertekstualitas) yang membentuk pesan media. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, analisis diarahkan untuk memahami latar belakang sosial,

politik, dan ekonomi yang memengaruhi kemunculan dan penyebaran suatu wacana, termasuk bagaimana relasi kuasa dan struktur sosial diartikulasikan atau ditantang melalui bahasa. Ketiga dimensi tersebut diintegrasikan untuk melihat bagaimana bahasa tidak hanya sebagai medium penyampai pesan, tetapi juga sebagai bentuk praktik sosial yang mencerminkan dan mereproduksi kepentingan ideologis.

Unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berita pemberitaan tentang pembebasan lahan pada 2 (dua) fase proses pembebasan lahan yaitu perencanaan, dan pelaksanaan jalan tol Solo - Jogja. Fase perencanaan

merupakan awal mula ada rencana pembangunan tol Solo - Jogja, dan fase pelaksanaan merupakan fase pengukuran tanah, kroscek administrasi, dan pembayaran untung ganti kerugian. Fase perencanaan terjadi pada tahun 2019 - 2020, sedangkan fase pelaksanaan terjadi pada 2021 - 2024. Perbedaan fase dilakukan dikarenakan adanya pemberitaan yang secara jelas menyampaikan penolakan hingga akhirnya proses pembebasan lahan berjalan yang secara langsung menandakan bahwasanya masyarakat yang terdampak pembebasan lahan menyetujui akan rencana pembangunan tol Solo - Jogja

#### D. TEMUAN

**Tabel 1.** Pemberitaan Kumparan terkait Pembebasan lahan Pembangunan Tol Solo-Jogja

Fase Perencanaan			
No	Tanggal	Judul Berita	Penulis/Editor
1	4 Januari 2019	Sri Sultan HB X Keberatan Jalan Tol Jogja-Solo Melalui Prambanan	Tim Tugu Jogja
2	20 Januari 2019	Jalan Tol Jogja-Solo Akan Dibangun Memanjang Hingga Kulonprogo	Tim Tugu Jogja
3	4 Juli 2019	Sri Sultan Tak Tolak Tol Melintasi Yogyakarta, Tapi Ada 4 Pesan	Penulis : Michael Agustinus Editor : Michael Agustinus
4	13 Agustus 2019	DPD RI Soroti Tol Jogja yang Berpotensi Gusur Pertanian Produktif	Tim Tugu Jogja

5	5 Oktober 2019	Jalan Tol Solo-Jogja Akan Dibangun Tahun 2021	Tim Bengawan News
6	4 Desember 2019	Pemda DIY Janji Warga Terdampak Tol Yogya - Solo Dapat Ganti Untung	Penulis : Michael Agustinus Editor : Michael Agustinus
7	10 Juli 2020	Sultan HB X Proyeksikan Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo hingga 2021	Penulis : Ayusandra Andany
8	9 September 2020	Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Siap Dikebut, Target Rampung 2023	Penulis : Michael Agustinus Editor : Michael Agustinus
<b>Fase Pelaksanaan</b>			
9	27 Januari 2022	Kisah Warga Klaten yang Tak Punya Tetangga karena Proyek Tol Solo-Yogyakarta	Penulis: Bengawan News (konten media partner) Reporter: Tara Wahyu Editor: Athalia Wika
10	30 Januari 2022	Pesan Sultan HB X pada Warga Penerima Ganti Rugi Jalan Tol: Jangan Dihamburkan	Ayusandra Andany
11	14 April 2022	Kraton Yogya Tak Lepas Tanah Sultan Ground untuk Tol, Tapi Beri Hak Pakai	Penulis : Michael Agustinus Editor : Michael Agustinus
12	25 Agustus 2022	Pembebasan Lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Capai Rp 3,4 T per Agustus 2022	Penulis: Nicha Muslimawati Editor: Nicha Muslimawati
13	16 Maret 2023	Imbas Pembangunan Tol Yogya-Solo bagi Petani Klaten	Penulis: Mellyana Rismawati (konten dari pengguna) Editor: Selfy Momongan
14	2 Agustus 2023	Foto: Rumah Terdampak Proyek Jalan Tol Jogja-Solo Dirobokkan	Penulis: Iqbal Firdaus Editor: Fadjar Hadi
15	28 Agustus 2023	Pembebasan Lahan Proyek Strategis di Jateng Paling Tinggi, Capai Rp 2,9 Triliun	Penulis: Angga Sukmawijaya Editor: Akbar Maulana
16	3 September 2024	Warga Sleman Mendadak Jadi Miliarder dari Pembebasan Lahan Jalan Tol Yogya-Solo	Penulis: Angga Sukmawijaya Editor: Arfiansyah Panji Purnandaru

Sumber: Kumparan.com

Pada fase perencanaan (2019-2020), media lebih banyak menyoroti pandangan elite lokal seperti Sri Sultan

HB X dan institusi negara, dengan penekanan pada aspek teknis pembangunan, perencanaan rute, dan

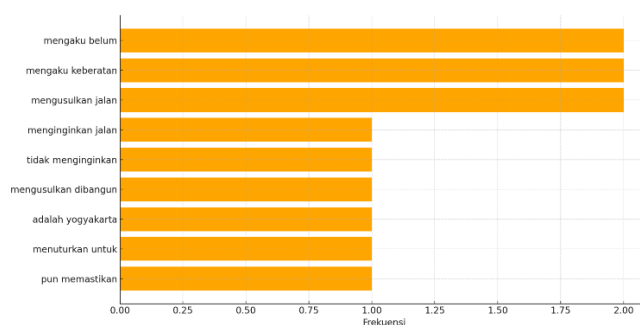




**Gambar 2.** *Word Cloud* Pemberitaan Fase Pelaksanaan  
(Sumber: Analisis Peneliti Menggunakan Orange)

*Word cloud* pemberitaan Kumparan pada fase pelaksanaan proyek jalan tol Solo-Jogja menunjukkan peningkatan intensitas kata-kata yang berkaitan langsung dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Kata-kata seperti "pembebasan," "tanah," "lahan," "pembangunan," "proyek," dan "jalan" tetap mendominasi, menunjukkan keberlanjutan narasi teknis dan infrastruktur. Namun, pada fase ini muncul lebih kuat istilah seperti "rp," "miliar," "ganti," "penerima," "warga," "rumahnya," dan "terdampak," yang mengindikasikan pemberitaan mulai menyoroti aspek kompensasi, nilai ekonomi, dan pengalaman masyarakat yang terdampak secara langsung oleh proyek ini.

Kata-kata seperti "petani," "kehilangan," "pindah," "menghambur," "sumanto," dan "kraton" menguatkan kesan bahwa isu sosial mulai menjadi bagian dari bingkai pemberitaan, meskipun narasi tersebut masih bercampur dengan representasi yang netral atau bahkan positif, seperti munculnya kata "kesejahteraan," "meningkatkan," dan "miliarder." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya menghadirkan suara warga, media tetap mempertahankan kerangka pembangunan sebagai sesuatu yang progresif dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan kata "kraton" dan "sultan" mengisyaratkan bahwa otoritas tradisional tetap memiliki posisi penting dalam wacana media.



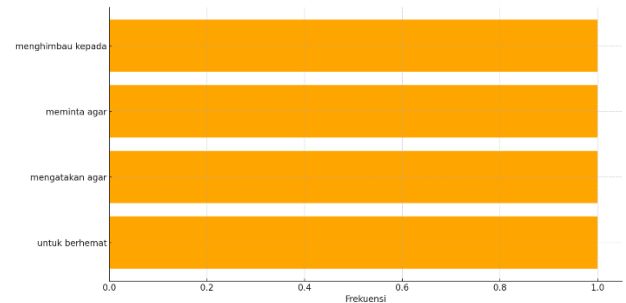
**Gambar 3.** Distribusi Dua Kata Setelah Kata "Sultan" Fase Perencanaan  
(Sumber: Analisis Penulis Menggunakan Orange)

Diagram ini menunjukkan bahwa frasa-frasa seperti "mengaku belum," "mengaku keberatan," dan

“mengusulkan jalan” paling sering muncul setelah kata “Sultan,” masing-masing sebanyak dua kali, yang menunjukkan bahwa media kerap mengaitkan Sultan HB X dengan respons-respons yang bersifat reflektif atau mempertimbangkan dengan cermat dinamika proyek pembangunan. Kemunculan frasa seperti “menginginkan jalan” dan “tidak menginginkan” yang masing-masing hanya muncul satu kali mengindikasikan representasi sikap Sultan yang tampak ambigu atau tidak sepenuhnya eksplisit, seolah-olah mempertimbangkan banyak sudut pandang. Selain itu, frasa seperti “mengusulkan dibangun,” “adalah Yogyakarta,” “menuturkan untuk,” dan “pun memastikan” memperkuat citra Sultan sebagai tokoh yang turut aktif dalam proses diskursif pembangunan, bukan sekadar simbol kultural.

Secara keseluruhan, media membingkai Sultan sebagai aktor yang berpengaruh namun berhati-hati dalam menyampaikan pandangan, dengan bahasa yang cenderung diplomatis dan tidak menimbulkan konfrontasi. Hal ini selaras dengan hasil analisis mikro yang menunjukkan bahwa representasi elite lokal dalam pemberitaan didominasi

oleh citra positif dan mendukung proyek pembangunan secara tersirat.



**Gambar 4.** Distribusi Dua Kata Setelah Kata 'Sultan' Fase Pelaksanaan (Sumber: Analisis Peneliti Menggunakan Orange)

Distribusi dua kata yang mengikuti kata “Sultan” dalam pemberitaan fase pelaksanaan proyek tol Solo-Jogja. Frasa-frasa seperti “menghimbau kepada,” “meminta agar,” “mengatakan agar,” dan “untuk berhemat” masing-masing tercatat muncul satu kali. Kemunculan frasa-frasa ini menunjukkan bahwa Sultan HB X lebih sering direpresentasikan sebagai figur yang memberikan nasihat atau imbauan kepada masyarakat dalam menghadapi dampak pembangunan.

Bentuk ujaran yang bersifat ajakan atau nasihat ini memperlihatkan peran Sultan sebagai sosok moral yang mengarahkan warga untuk bersikap bijak, terutama dalam mengelola kompensasi atau perubahan sosial yang terjadi akibat proyek. Berbeda dengan representasi pada fase perencanaan yang lebih

menampilkan posisi Sultan sebagai pihak yang mempertimbangkan aspek teknis proyek, dalam fase pelaksanaan ini Sultan lebih ditampilkan sebagai tokoh yang bersikap membimbing dan menenangkan, tanpa menunjukkan sikap kritis terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan.

### 1. Dimensi Mikro

Dalam analisis linguistik tahap mikro terdapat 4 (empat) elemen yaitu Leksikal, Sintaksis, Metafora, dan Gaya Bahasa. Dalam pemberitaan fase perencanaan jalan tol Jogja-Solo, pemilihan kata atau *Leksikal* seperti "keberatan" dan "mengusulkan" yang secara eksplisit berasal dari pernyataan Sri Sultan HB X menunjukkan posisi dominan beliau sebagai raja lokal yang memiliki otoritas simbolik dan politik atas wilayahnya. Media menggambarkan Sultan sebagai sosok yang "tegas", sehingga memperkuat citra beliau bukan sekadar gubernur administratif, melainkan penguasa budaya yang kata-katanya menjadi arah kebijakan dan sikap publik. Dengan menyuarakan keberatan terhadap trase tol dan mengusulkan alternatif, Sultan memosisikan dirinya sebagai penjaga ruang budaya dan kepentingan masyarakat. Leksikon yang

digunakan membentuk wacana bahwa masyarakat tidak hanya dihitung sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai komunitas yang tunduk dan mengikuti arahan Sultan, sehingga resistensi terhadap proyek negara tampil sah melalui otoritas lokal yang dihormati dan ditaati.

Pada fase perencanaan cenderung mendukung terhadap proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja, pilihan kata seperti "meningkatkan perekonomian," "siap dikebut," dan "segera tersambung" membentuk narasi pembangunan yang progresif dan tak terhindarkan. Frasa "meningkatkan perekonomian" melegitimasi proyek dengan menjanjikan kesejahteraan sebagai hasil akhirnya. Sementara itu, "siap dikebut" memberi kesan percepatan yang penuh semangat, mencitrakan pemerintah sebagai pihak yang efisien dan berorientasi hasil. Kata "segera tersambung" menyiratkan bahwa konektivitas antarwilayah adalah solusi utama bagi keterisolasian. Secara keseluruhan, leksikon ini merepresentasikan pembangunan sebagai kebutuhan mendesak yang membawa kebaikan kolektif, sambil mereduksi kerumitan sosial dan budaya



di baliknya akan tetapi hanya sedikit memberitakan mengenai warga yang terdampak.

Berbeda dengan fase perencanaan, pada fase pelaksanaan kata-kata yang digunakan merefleksikan posisi kapitalisme dan cenderung mendukung pembangunan. Kata seperti "realisasi", "miliarder" dan "ganti untung" sering muncul dalam pemberitaan. Kata "realisasi" dimaknai sebagai simbol keberhasilan yang menutupi potensi konflik sosial, "miliarder" membingkai warga penerima kompensasi sebagai sosok beruntung dan sukses, sementara "ganti untung" menggantikan istilah "ganti rugi" untuk menciptakan kesan bahwa warga tidak dirugikan, melainkan diuntungkan secara ekonomi. Ketiga pilihan kata ini secara leksikal membentuk narasi positif yang mendukung legitimasi pembangunan dan meredam kritik terhadap ketimpangan atau pemaksaan dalam proses pembebasan lahan.

Kedua pada elemen *Sintaksis*, atau struktur kalimat secara umum menggunakan pola kalimat kompleks dan bertingkat, terutama dengan menggabungkan klausa utama dan klausa tambahan. Kalimat-kalimat ini

sering menggunakan hubungan sebab-akibat untuk menjelaskan alasan atau dampak suatu peristiwa, misalnya dalam kutipan langsung dari Sri Sultan HB X: "Kami keberatan kalau (Tol Jogja-Solo) melewati Prambanan. Sebab banyak terdapat situs di situ." Penggunaan kalimat langsung tersebut secara eksplisit memperkuat legitimasi argumen Sultan serta menonjolkan otoritasnya dalam isu tersebut. Selain itu, struktur kalimat pasif yang sering muncul dalam teks seperti "Jalan tol Jogja-Solo direncanakan memanjang hingga ke Kabupaten Kulonprogo," menciptakan kesan administratif yang secara eksplisit menunjukkan pihak tertentu yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut struktur kalimat kondisional juga muncul dalam teks yang menunjukkan berbagai skenario atau kemungkinan dampak pembangunan tol, misalnya pada kalimat: "Jika hal itu ditemukan maka konstruksi tol yang harus mengalah." Pola ini menggambarkan kompleksitas teknis, ekonomi, dan budaya yang terkait dalam pembangunan jalan tol. Penggunaan kalimat bertingkat secara rinci juga mencerminkan upaya Kumparan dalam menyajikan informasi secara inklusif dan

komprehensif, seperti terlihat dalam kalimat: "Kalau tol Yogya-Solo kami pikir tak ada persoalan dan bisa mendukung aksesibilitas. Namun untuk yang Yogya-Bawen atau yang ke arah Purworejo, kami khawatir di utara Yogya itu banyak lahan pertanian produktif yang jadi korban." Secara keseluruhan, pola struktur kalimat tersebut menjadi instrumen penting bagi media dalam membingkai isu pembebasan lahan, menegaskan otoritas lokal.

Akan tetapi, pada fase pelaksanaan, dalam struktur sintaksis berita Kumparan, terlihat pola kalimat yang secara strategis menempatkan subjek manusia terutama warga terdampak di awal kalimat. Misalnya dalam kalimat "Keluarga Sumanto (58) kini harus hidup menyendiri tanpa tetangga...", struktur ini memberi penekanan pada posisi korban, menjadikannya pusat perhatian sejak awal paragraf. Kalimat ini menggunakan bentuk pasif terselubung yang tidak langsung menunjukkan agen utama penyebab peristiwa, seperti dalam: "belasan rumah... telah rata dengan tanah, akibat terdampak proyek pembangunan tol". Alih-alih menggunakan struktur aktif seperti "pemerintah menggsur", penulis

menggunakan kalimat pasif untuk meredam pelaku utama dan menempatkan fokus pada akibatnya.

Sebaliknya, ketika menyampaikan pernyataan dari otoritas seperti Sultan HB X, digunakan struktur yang formal dan aktif, seperti "Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menghimbau kepada warga..." atau "untuk berhemat". Kalimat-kalimat ini menegaskan posisi kuasa dan otoritas. Subjek dalam struktur ini menjadi agen aktif yang melakukan tindakan langsung. Struktur seperti ini mengangkat citra pemimpin sebagai pengendali keadaan, sekaligus menciptakan kontras dengan struktur pasif yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat biasa. Kontras ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang dibentuk secara sintaksis, di mana elite digambarkan aktif dan masyarakat digambarkan sebagai pihak yang mengalami.

Ketiga terkait *metafora* dan *simbolisme*, pada fase perencanaan, metafora "mengepras," yang menunjukkan tindakan destruktif, secara simbolis memperlihatkan pembangunan sebagai kekerasan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Dengan berbagai simbol dan metafora

tersebut, Kumparan secara implisit menyampaikan pesan bahwa proyek tol ini tidak sekadar persoalan teknis, tetapi mengandung kompleksitas nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius.

Simbolisme juga tampak dalam diksi seperti "tanah Sultan Ground" dan "Keraton tidak akan melepas tanahnya". Ini bukan sekadar soal hak milik, tetapi simbol kekuasaan historis yang masih hidup dalam tatanan sosial modern. Kata "melepas" memuat makna simbolik seolah tanah itu memiliki nilai sakral yang tidak bisa dipindahtangankan sembarangan. Dalam konteks ini, tanah menjadi lebih dari aset ekonomi; ia merupakan simbol legitimasi, keberlanjutan kultural, dan otoritas politik.

Terakhir yang keempat, terkait *gaya bahasa*, pada fase perencanaan, gaya bahasa dalam pemberitaan Kumparan mengenai pembangunan jalan tol Jogja-Solo menunjukkan kombinasi antara penyampaian informasi faktual dengan pendekatan emosional yang membangun kedekatan dengan pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan cenderung lugas dan deskriptif untuk menggambarkan

kejadian secara objektif, seperti pernyataan tentang sikap Gubernur DIY terhadap proyek tol. Namun di sisi lain, Kumparan juga menyisipkan diksi-diksi yang mengandung muatan emosional seperti "keberatan," "sayang jika," dan "terbelah," yang menciptakan kesan empati terhadap masyarakat terdampak. Gaya kutipan langsung juga digunakan secara strategis untuk memperkuat otentisitas suara tokoh dan meningkatkan daya tarik narasi.

Di sisi lain pada fase pelaksanaan, saat membahas pernyataan pihak otoritas, gaya bahasa menjadi formal dan institusional, seperti pada kalimat: "Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menghimbau kepada warga...". Penggunaan kata kerja seperti menghimbau, menyampaikan, dan menegaskan menunjukkan gaya bahasa birokratis dan resmi, yang membedakan cara media menarasikan warga biasa dengan pejabat. Perbedaan gaya ini bukan sekadar teknis, tetapi mencerminkan struktur sosial yang sedang diwakili dalam teks, di mana warga digambarkan sebagai individu konkret dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan pemangku kepentingan

dihadirkan dalam bentuk posisi formal dengan pernyataan kebijakan.

Selain itu, gaya bahasa Kumparan menunjukkan kecenderungan menggabungkan bahasa jurnalistik informatif dengan elemen *storytelling*. Gaya ini memudahkan pembaca untuk terhubung secara emosional sekaligus memahami konteks kebijakan secara umum. Ini menunjukkan strategi diskursif media dalam membentuk persepsi publik yaitu di satu sisi, menyoroti dampak sosial dari pembangunan sedangkan di sisi lain, tetap memberi ruang narasi bagi otoritas dan negara.

## 2. Dimensi Meso

Pendekatan agenda setting pada tingkat meso memperlihatkan bagaimana kebijakan redaksional, struktur organisasi media, dan rutinitas produksi berita membentuk arah pemberitaan yang berpihak pada narasi pembangunan pemerintah. Analisis terhadap 16 artikel menunjukkan bahwa sebagian besar ditulis oleh Michael Agustinus, kontributor utama di kanal bisnis Kumparan (Kumparan, 2025). Hal ini mencerminkan kecenderungan institusional media untuk menempatkan pembangunan ekonomi dan investasi sebagai isu prioritas. Hal ini bisa terjadi

dikarenakan editorial merupakan genre diskursif dengan struktur yang stabil namun variabel, penulis mungkin membawa preferensi tematik mereka saat menulis lintas genre, tetapi tingkat pengaruh ini bisa bervariasi. Misalnya, saat menulis berita (tema B), seorang penulis mungkin tetap mencerminkan gaya editorialnya (tema A) dalam hal argumentasi dan intertekstualitas (Nikonova, 2023).

Posisi Agustinus dalam kanal bisnis berperan penting dalam pembingkaihan isu, di mana pemberitaan lebih banyak menyoroti aspek ekonomi ketimbang persoalan sosial atau lingkungan. Rutinitas redaksional di kanal ini, yang cenderung menekankan capaian ekonomi dan kemajuan infrastruktur, menjadi bagian dari mekanisme *gatekeeping* media: berita yang memuat narasi "ganti untung", "percepatan pembangunan", atau "konektivitas regional" lebih sering ditampilkan sebagai *headline*, sedangkan suara masyarakat terdampak hanya dimuat secara minimal atau dalam paragraf akhir. Ini memperlihatkan bagaimana pemilihan topik dan atribut dalam pemberitaan dilakukan secara selektif sesuai prioritas redaksi.

Kebijakan editorial Kumparan juga menunjukkan adanya pola produksi berita yang sejalan dengan arah pembangunan negara. Proses wacana yang dilakukan oleh jurnalis dan editor secara konsisten mengedepankan narasi pro-pemerintah, di mana proyek jalan tol direpresentasikan sebagai simbol kemajuan dan efisiensi pembangunan. Dalam konteks ini, agenda setting media tidak hanya terjadi pada pemilihan isu (*first-level agenda setting*), tetapi juga pada penekanan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut (*second-level agenda setting*), yaitu dengan mempromosikan manfaat ekonomi dan menutupi potensi konflik sosial.

Lebih jauh, struktur organisasi media Kumparan yang berada di bawah kepemilikan GDP Venture, anak usaha Djarum Group turut memengaruhi preferensi redaksional. Sebagai bagian dari konglomerasi bisnis besar yang berkepentingan pada stabilitas ekonomi dan citra positif proyek-proyek pemerintah, strategi pemberitaan Kumparan merefleksikan orientasi ideologis yang selaras dengan kepentingan pemilik modal. Dalam konteks ini, proses penyusunan berita tidak terlepas dari tekanan struktural

organisasi media, yang mengarahkan redaksi untuk membentuk wacana pembangunan yang positif dan minim kritik.

Keterpaduan antara rutinitas jurnalistik, posisi kanal bisnis, peran jurnalis, dan struktur kepemilikan ini menggambarkan bagaimana media bekerja sebagai institusi yang memiliki agenda tersendiri. Agenda tersebut tidak hanya ditentukan oleh individu jurnalis, melainkan oleh konfigurasi organisasi yang menentukan preferensi isu, wacana naratif, dan penempatan informasi. Sebagai hasilnya, publik yang mengakses pemberitaan Kumparan akan lebih banyak terpapar narasi pembangunan sebagai kemajuan ekonomi, sementara dimensi sosial, konflik lahan, atau ketimpangan kekuasaan cenderung disingkirkan dari ruang redaksional.

Dengan demikian, analisis pada dimensi meso agenda setting menunjukkan bahwa media seperti Kumparan tidak netral dalam menyampaikan realitas, melainkan berperan aktif dalam membentuk persepsi publik melalui struktur organisasi, rutinitas pemberitaan, dan afiliasi kepemilikan yang terhubung

dengan kepentingan negara dan kapital besar.

### 3. Dimensi Makro

Pada tataran makro, pemberitaan Kumparan mengenai pembangunan jalan tol Solo-Jogja tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi-politik yang lebih luas, terutama logika kapitalisme media. Kapitalisme media merujuk pada kondisi ketika institusi media tidak hanya menjadi saluran informasi publik, tetapi juga beroperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang tunduk pada kepentingan pasar, pemilik modal, dan negara. Dalam kerangka ini, media massa cenderung menyampaikan narasi yang sejalan dengan kepentingan dominan, alih-alih menghadirkan keragaman perspektif atau kritik terhadap kekuasaan.

Kepemilikan Kumparan oleh GDP Venture, yang merupakan anak usaha dari Djarum Group, sebuah konglomerat besar Indonesia dengan kepentingan luas di sektor perbankan, ritel, dan teknologi menunjukkan keterhubungan erat antara media dan kapital. Keterkaitan ini secara ideologis memengaruhi arah pemberitaan Kumparan, di mana proyek strategis pemerintah seperti jalan tol Solo-Jogja dibingkai sebagai bagian dari narasi kemajuan, efisiensi pembangunan,

dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pemberitaan Kumparan, narasi "ganti untung", "mendorong investasi", atau "meningkatkan konektivitas" mendominasi, sementara suara masyarakat terdampak, persoalan keadilan lahan, serta dampak lingkungan cenderung diminimalkan.

Dominasi narasi pembangunan ini menunjukkan bagaimana media berfungsi mereproduksi ideologi dominan, yaitu ideologi pembangunan pro-negara dan pro-kapital. Jalan tol sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) diposisikan bukan sebagai persoalan multidimensi, melainkan sebagai simbol keberhasilan negara dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam kapitalisme media, wacana seperti ini menjadi mekanisme kultural untuk memperoleh legitimasi publik terhadap proyek-proyek besar, sekaligus meredam potensi resistensi sosial.

Kapitalisme media juga tampak dalam bentuk komersialisasi perhatian berupa narasi yang menjanjikan pertumbuhan, efisiensi, dan keuntungan ekonomi lebih "layak jual" dibanding isu-isu resistensi warga atau kritik struktural. Algoritma distribusi konten digital memperkuat hal ini, karena konten positif

tentang pembangunan lebih mudah dikapitalisasi sebagai bagian dari ekonomi klik, sponsor, atau dukungan negara.

Dengan demikian, dari dimensi makro, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan Kumparan tidak lepas dari logika kapitalisme media. Hubungan antara kepemilikan, kepentingan pasar, dan struktur kekuasaan negara membentuk lanskap wacana pembangunan yang timpang. Alih-alih menjadi ruang deliberatif bagi berbagai perspektif masyarakat, media bertransformasi menjadi instrumen hegemoni yang memperkuat posisi negara dan kapital, serta mengaburkan realitas sosial yang dihadapi oleh komunitas terdampak pembangunan.

## E. BAHASAN

Pemberitaan media mengenai pembangunan infrastruktur hampir tidak pernah hadir dalam ruang yang bebas dari nilai dan kepentingan. Dalam kasus proyek jalan tol Solo-Jogja, Kumparan tidak hanya memberitakan, tetapi juga memproduksi dan menyebarluaskan wacana yang mencerminkan relasi kuasa antara negara, elite lokal, dan masyarakat terdampak. Melalui bahasa, pilihan diksi,

struktur narasi, dan seleksi sumber, Kumparan membingkai pembangunan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, progresif, dan menguntungkan semua pihak, sehingga menjadi sebuah narasi yang secara halus menyingkirkan kompleksitas konflik sosial yang menyertainya.

Kecenderungan ini dapat terlihat sejak dari penggunaan istilah-istilah yang secara semantik mengandung daya pengaruh. Kata-kata seperti "siap dikebut", "segera tersambung", atau "meningkatkan perekonomian" membangun kesan bahwa proyek tol ini berada dalam jalur yang mulus dan penuh dukungan. Dalam konteks ini, bahasa menjadi alat politik untuk menormalisasi dan meyakinkan publik bahwa pembangunan adalah kebutuhan rasional dan objektif, padahal ia sarat dengan agenda ideologis. Istilah "ganti untung", misalnya, secara strategis menggantikan frasa "ganti rugi", menyisipkan kesan bahwa warga bukan sekadar diberi kompensasi, tetapi malah diuntungkan dari penggusuran ruang hidupnya. Padahal di balik frasa tersebut terdapat realitas yang tidak sesederhana itu, yakni negosiasi yang timpang, ketidaksesuaian nilai, dan hilangnya

keterikatan spasial-komunal masyarakat terhadap tanah mereka.

Wacana yang dikonstruksi Kumparan juga menempatkan aktor-aktor tertentu sebagai pusat legitimasi. Sri Sultan HB X muncul sebagai figur yang bukan hanya administratif, tetapi juga simbolik. Kutipan pernyataan beliau sering disajikan secara utuh dan tanpa penyeimbang, menciptakan posisi sebagai otoritas moral dan kultural yang tak tersentuh. Ketika Sultan menyuarakan penolakan terhadap trase tol yang melintasi kawasan Prambanan, media tidak membingkainya sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan, tetapi sebagai bentuk kebijaksanaan dari penguasa lokal. Dalam narasi ini, keberpihakan Sultan menjadi perpanjangan dari logika negara, sekaligus menekan potensi resistensi masyarakat dengan simbolisme budaya yang sakral. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang terjadi di Zimbabwe, media negara dan swasta menunjukkan pelaporan yang terpolarisasi, di mana media swasta sering berperan sebagai corong partai oposisi (Jakaza, 2019).

Jika ditinjau melalui perspektif Agenda Setting, pemberitaan Kumparan

tidak hanya menentukan isu apa yang penting, tetapi juga aspek mana yang ditonjolkan kepada publik. Pada level first-level agenda setting, pembangunan jalan tol diposisikan sebagai isu utama dengan narasi tentang percepatan proyek, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Konflik agraria, sengketa ganti rugi, dan hilangnya ruang hidup warga ditempatkan di pinggiran, bahkan sering diabaikan. Pada level second-level agenda setting, penekanan pada atribut tertentu dilakukan melalui diksi "ganti untung" yang menggantikan "ganti rugi" dan penggambaran figur Sri Sultan HB X sebagai simbol kebijaksanaan. Dengan cara ini, media tidak hanya memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana seharusnya memikirkan isu tersebut pembangunan dipersepsikan sebagai solusi progresif yang tidak terhindarkan, sementara resistensi sosial dianggap sekunder.

Kecenderungan pro-pembangunan yang muncul juga tidak bisa dilepaskan dari logika Kapitalisme Media. Kumparan sebagai bagian dari GDP Venture, anak usaha Djarum Group, beroperasi dalam kerangka kepemilikan media yang sarat kepentingan ekonomi-politik. Dalam sistem ini, pemberitaan tentang proyek



strategis nasional seperti jalan tol Solo-Jogja dikonstruksi sejalan dengan kepentingan kapital dan negara. Narasi positif tentang “miliarder dadakan” atau pembangunan yang “meningkatkan kesejahteraan” tidak sekadar produk jurnalistik, tetapi bagian dari strategi komersialisasi atensi di era digital. Konten pro-pembangunan lebih mudah dikapitalisasi dalam bentuk klik, iklan, dan legitimasi politik, sementara narasi resistensi atau kritik struktural dianggap kurang “layak jual” bagi industri media. Dengan demikian, kapitalisme media berperan penting dalam memperkuat agenda setting dan membentuk wacana hegemonik tentang pembangunan.

Sementara itu, masyarakat terdampak lebih sering ditampilkan dalam posisi yang pasif dan deskriptif. Warga yang digusur atau kehilangan tanah ditulis sebagai figur yang “menerima”, “mengaku ikhlas”, atau “memahami pentingnya proyek nasional”. Kisah mereka hadir, tetapi mereka menjadi latar dari cerita besar pembangunan, bukan tokoh utamanya. Ketika kisah warga muncul dalam bentuk narasi emosional berupa artikel tentang rumah yang harus dibongkar atau sawah yang tak lagi dapat digarap, narasi

tersebut tetap berada dalam bingkai yang tidak mengganggu kerangka besar pembangunan.

Strategi semacam ini menunjukkan bagaimana media bekerja tidak hanya melalui apa yang ditampilkan, tetapi juga melalui apa yang diabaikan. Dalam banyak berita, konflik agraria, ketimpangan nilai ganti rugi, atau hilangnya identitas ruang tidak pernah benar-benar menjadi isu utama. Narasi tentang “miliarder dadakan” menjadi semacam fantasi kolektif yang mengaburkan fakta bahwa banyak warga justru mengalami kerugian struktural. Dengan mengangkat kisah-kisah warga yang berhasil membeli mobil atau rumah baru setelah menerima ganti rugi, media menggiring persepsi publik bahwa pembangunan membawa berkah, bukan ketimpangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang terjadi di India, di mana artikel media tentang pengadaan lahan, rehabilitasi, dan relokasi (LARR) umumnya menyoroti isu-isu langsung seperti kompensasi dan kehilangan tanah, namun sering mengabaikan dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas hidup, hilangnya mata pencaharian, dan isu

berbasis gender (Sen Sharma & Jothiprakash, 2024)

Jika ditarik ke tingkat struktur produksi wacana, pemberitaan ini sebagian besar datang dari kanal bisnis Kumparan, dengan jurnalis yang secara konsisten menggunakan perspektif ekonomi. Hal ini memperkuat posisi bahwa narasi yang dominan bukan sekadar pilihan individu, tetapi bagian dari praktik institusional media yang memiliki afiliasi dengan kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Kumparan, yang dimiliki oleh GDP Venture (anak usaha Djarum Group), memiliki koneksi kuat dengan logika kapital yakni stabilitas ekonomi, kelancaran investasi, dan promosi citra pembangunan. Dalam hal ini, media tidak netral, namun berada dalam posisi yang menguntungkan status quo, baik secara politik maupun ekonomi. Akuisisi media oleh konglomerat korporat dapat mengubah kecenderungan politik surat kabar. Sebagai contoh, akuisisi oleh News Corp menyebabkan pergeseran konservatif dalam arah politik surat kabar-surat kabar di Australia, sementara akuisisi lainnya justru menyebabkan pergeseran menjauh dari perspektif konservatif (Ananyev & Volkova, 2024).

Wacana yang dihasilkan bukan semata produk jurnalistik, tetapi bagian dari produksi ideologi. Dalam konteks ini, analisis wacana kritis menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya cermin realitas, melainkan juga alat untuk mengontrolnya. Pembangunan tidak hanya dibahas sebagai peristiwa ekonomi-teknis, tetapi sebagai narasi politik dan ideologis yang membentuk kesadaran publik. Wacana alternatif mengenai hak warga, ruang hidup, konflik agrarian tidak ditolak secara langsung, tetapi dilemahkan dengan tidak diberi ruang artikulasi yang setara. Di sinilah kekuasaan bekerja, bukan dalam bentuk represi keras, tetapi dalam dominasi simbolik dan pengendalian makna. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang terjadi di Afrika Selatan, pers komersial yang berakar pada struktur kekuasaan kapitalis cenderung meminggirkan suara-suara alternatif dan kontra-hegemonik, media semacam ini sering membingkai perdebatan mengenai lahan secara negatif, dengan menggunakan perspektif neoliberal yang sempit, yang mendeligitimasi kepentingan pihak-pihak yang kehilangan hak dan mendukung status quo (Radebe & Chiumbu, 2022).

Dengan demikian, analisis wacana kritis terhadap pemberitaan Kumparan membuka pemahaman yang lebih dalam bahwa proyek infrastruktur seperti jalan tol Solo-Jogja bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi tentang siapa yang boleh bersuara, siapa yang direpresentasikan, dan bagaimana realitas itu diproduksi, disebarluaskan, dan dilegitimasi melalui bahasa media. Dalam struktur kapitalisme negara yang menyandarkan legitimasi pada pembangunan, media menjadi alat penting untuk membingkai kemajuan dan menyingkirkan keraguan. Dalam proses ini, kesenjangan sosial dan kerentanan masyarakat tidak selalu dihilangkan, tetapi dibuat tidak terlihat.

## F. KESIMPULAN

Analisis wacana kritis terhadap pemberitaan Kumparan mengenai pembangunan jalan tol Solo-Jogja menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi agen ideologis yang aktif membentuk realitas sosial. Melalui mekanisme agenda setting, Kumparan memprioritaskan narasi pembangunan yang selaras dengan logika negara dan

kepentingan kapital, sambil menyingkirkan suara masyarakat terdampak dari ruang wacana publik. Pilihan bahasa yang menormalisasi pembangunan, representasi aktor yang timpang, serta penyamaran konflik sosial di balik retorika pertumbuhan ekonomi mencerminkan bagaimana media mereproduksi struktur kuasa. Dalam kerangka kapitalisme media, praktik ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kepentingan ekonomi-politik media dan hegemoni ideologi pembangunan yang menguntungkan pihak dominan.

Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan dengan membandingkan praktik agenda setting di berbagai media yang memiliki orientasi politik, model bisnis, dan kepemilikan berbeda. Selain itu, pendekatan etnografi wacana atau studi resepsi publik dapat digunakan untuk memahami bagaimana wacana yang dibentuk media memengaruhi kesadaran, sikap, dan respons masyarakat terdampak, sekaligus mengidentifikasi potensi resistensi diskursif dari aktor lokal maupun media alternatif.

## REFERENSI

- Adebayo, J. O. (2019). The Bill, the Billed and Billy: analysis of media framing of the South African land expropriation Bill. *African Identities*, 17(2), 147-162. <https://doi.org/10.1080/14725843.2019.1664283>
- Ananyev, M., & Volkova, E. (2024). Media ownership and ideological slant: Evidence from Australian newspaper mergers. *PLOS ONE*, 19(12), e0315137. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315137>
- Arnani, M. (2024, November 8). *Per Hari Ini, Tarif Tol Solo-Jogja Resmi Berlaku Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/11/08/093353626/per-hari-ini-tarif-tol-solo-jogja-resmi-berlaku?page=all>
- Blach-Ørsten, M., Willig, I., Kæmsgaard, M., & Burkal, R. (2024). Changing Forms of Ownership in a Democratic Corporatist Media System – How Digitalization Leads to Less Transparency and the Risk of Media Capture. *Comunicação e Sociedade*, 46, e024023. [https://doi.org/10.17231/comsoc.46\(2024\).5691](https://doi.org/10.17231/comsoc.46(2024).5691)
- Carroll, C. E. (2010). Corporate reputation and the news media: Agenda-setting within business news coverage in developed, emerging, and frontier markets. In *Corporate Reputation and the News Media: Agenda-Setting within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets*. <https://doi.org/10.4324/9780203868584>
- Carroll, C. E. (2024). Agenda-setting theory. In *Elgar Encyclopedia of Corporate Communication* (pp. 60-66). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802200874.ch10>
- Carroll, C. E., & McCombs, M. (2003). Agenda-setting Effects of Business News on the Public's Images and Opinions about Major Corporations. *Corporate Reputation Review*, 6(1), 36-46. <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540188>
- Colvin, R. M., Witt, G. B., Lacey, J., & McCrear, R. (2020). The role of conflict framing and social identity in public opinion about land use change: An experimental test in the Australian. *Environmental Policy and Governance*, 30(2), 84-98. <https://doi.org/10.1002/eet.1879>
- D'Angelo, P. (2002). News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: a Response to Entman. *Journal of Communication*, 52(4), 870-888. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02578.x>
- Dhamayanti, L. P., Mani, L., & Dhamayanti, M. (2024). Online News: Media Framing On Indonesia's Capital City Relocation Policy. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 51(6). <https://doi.org/10.35516/hum.v51i6.3>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriza Reziana, & Alex Sobur. (2023). Praktik Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 39-44. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v3i1.1789>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman .
- Faujjah, N. A., & Rubiyanah, R. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Kulon Progo terkait Pembangunan Bandara Yia Pada Medcom.id dan Tirto.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 2(1), 72-80. <https://doi.org/10.15408/JSJ.V1I2.14576>
- Foucault, M. (2002). *The Archeology of Knowledge*. [www.alhassanain.org/english](http://www.alhassanain.org/english)
- Harding, R., & Ray, S. (2022). Framing Land Governance Issues in Indigenous and Settler Media within Canada. *The International Indigenous Policy Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.18584/iipj.2021.12.4.11153>

- Hendrickson, E., & Wilkins, L. (2009). The wages of synergy. *Journalism Practice*, 3(4), 377-391. <https://doi.org/10.1080/17512780902798729>
- Idid, S. A. (2017). Agenda Setting: Probing the Issues during the 13th General Election. *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 33(2), 1-12. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2017-3302-01>
- Imamul Huda, R., Dimiyati, I., & Muldi, A. (2025). Propaganda Ancaman Politik Identitas dalam Teks Pidato Jokowi. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 17(1), 180-199. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i1.7304>
- Jakaza, E. (2019). "Land Reform Costly": Zimbabwe Land Reform Negation Discourse in the Print Media. *Language Matters*, 50(1), 102-114. <https://doi.org/10.1080/10228195.2018.1524922>
- Ju, W., Sannusi, S. N., & Mohamad, E. (2023). "Public goods" or "diplomatic tools": a framing research on Chinese and American media reports regarding Chinese COVID-19 vaccine. *Media Asia*, 50(1), 43-81. <https://doi.org/10.1080/01296612.2022.2081651>
- Khan, S., Raza, S. H., Ilyas, M., Shah, A. A., Zaman, U., Ogadimma, E. C., & Sattar, S. (2025). Hybrid model of machine and deep learning to analyze Twitter data and prediction of online public opinion: revisiting agenda-setting implications. *Information Discovery and Delivery*. <https://doi.org/10.1108/IDD-06-2024-0086>
- Kleinnijenhuis, J., Schultz, F., Utz, S., & Oegema, D. (2015). The Mediating Role of the News in the BP Oil Spill Crisis 2010: How U.S. News Is Influenced by Public Relations and in Turn Influences Public Awareness, Foreign News, and the Share Price. *Communication Research*, 42(3), 408-428. <https://doi.org/10.1177/0093650213510940>
- Klikauer, T. (2022). Media Capitalism: Hegemony in the Age of Mass Deception. In *Media Capitalism: Hegemony in the Age of Mass Deception*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-87958-7>
- Knoche, M. (2019). The crisis-ridden capitalist mode of production as driving force for restructurations and transformations in and of the media industry. explanatory theoretical elements of a cri-tique of the political economy of the media. *TripleC*, 17(2), 287-307. <https://doi.org/10.31269/triplec.v17i2.1137>
- Kumparan. (2025). *Profil Michael Agustinus*. <https://Kumparan.Com/Michael-Agustinus>.
- Langer, A. I., & Gruber, J. B. (2021). Political Agenda Setting in the Hybrid Media System: Why Legacy Media Still Matter a Great Deal. *International Journal of Press/Politics*, 26(2), 313-340. <https://doi.org/10.1177/1940161220925023>
- Li, Y., & Shen, Z. (2025). Virtue Ethics and Media Framing: Comparative Analysis of Conservative and Liberal U.S. News Coverage of Japanese Immigration During Policy Shifts (2019-2024). *Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 22(1), 582-609. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-86000792248&partnerID=40&md5=e200f08ec21985efec8703fd31ad5bcd>
- Lule, J. (2018). Media industry. In *The Oxford Handbook of Global Studies* (pp. 579-596). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190630577.013.43>
- McCombs, M. (2015). Agenda Setting, Media Effects on. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 351-356). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.95007-4>
- McCombs, M. E., Shaw, D. L., & Weaver, D. H. (2014). New Directions in Agenda-Setting Theory and Research. *Mass Communication and Society*, 17(6), 781-802. <https://doi.org/10.1080/15205436.2014.964871>
- Nikonova, E. A. (2023). Editorial as a Discursive Genre. *Nauchnyi Dialog*, 12(3), 153-170. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-3-153-170>

- Pan, Z., & Kosicki, G. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55-75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Perloff, R. M. (2022). The Fifty-Year Legacy of Agenda-Setting: Storied Past, Complex Conundrums, Future Possibilities. *Mass Communication and Society*, 25(4), 469-499. <https://doi.org/10.1080/15205436.2021.2017689>
- Qin, H., An, Y., Qin, H., & Zhu, J. (2020). The Impact of Online Media Coverage on Corporate Performance. *ACM International Conference Proceeding Series*, 162-166. <https://doi.org/10.1145/3414752.3414795>
- Radebe, M. J., & Chiumbu, S. H. (2022). Frames and Marginalisation of Counter-hegemonic Voices: Media Representation of the Land Debate in South Africa. *African Journalism Studies*, 43(1), 89-106. <https://doi.org/10.1080/23743670.2022.2033289>
- Radwan, A. F., Al Saied, N. F., & Mousa, S. A. (2025). Framing Environmental Issues in the Egyptian Press during COP27. *Studies in Media and Communication*, 13(1), 191-205. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i1.7327>
- Reese, S. D. (2007). The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited. *Journal of Communication*, 57(1), 148-154. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x>
- Ricketts, A. (2024). Land means the world: narratives of place and colonial ecological violence in the media framing of the Bears Ears National Monument. *Environmental Sociology*, 10(1), 89-103. <https://doi.org/10.1080/23251042.2023.2267832>
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi Realitas Media Online Mengenai Kekerasan Aparat Kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(1), 53-70. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>
- Roro, R., & Zahra, R. L. (2024). Implementasi Pelaksanaan Ganti Kerugian Jalan Tol Solo-Yogyakarta. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(7), 1534-1548. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p13>
- Sanders, M., & van de Vrande, V. (2025). The owner-market fit and responses to competing logics. *Journal of Media Business Studies*, 22(1), 21-49. <https://doi.org/10.1080/16522354.2024.2356362>
- Sen Sharma, K., & Jothiprakash, V. (2024). Reviewing the reportage of land acquisition, rehabilitation and resettlement issues in mainstream Indian Media. *Land Use Policy*, 147, 107367. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107367>
- Setiawan, A., Nurmandi, A., Usman, S., & Qodir, Z. (2024). Indonesian Government Communication in Media Framing in Covid-19 Crisis Policy. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), e07035. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-174>
- Sutikno, S., Judijanto, L., Purba, R., Fatmawati, E., Risnawaty, R., Ningrum, D. W., Herman, H., & Saputra, N. (2025). Critical Discourse Analysis (CDA) of Norman Fairclough's Theory on Gojek YouTube Advertisement GoSend Version: Jadi #BestSellerGoSend Bareng Ariel Noah. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 175. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7561>
- Thesen, G. (2014). Political Agenda Setting as Mediatized Politics? Media-Politics Interactions from a Party and Issue Competition Perspective. *International Journal of Press/Politics*, 19(2), 181-201. <https://doi.org/10.1177/1940161213515756>
- Valenzuela, S., & McCombs, M. (2019). The agenda-setting role of the news media. In *An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Third Edition* (pp. 99-112). <https://doi.org/10.4324/9780203710753-10>
- Van Dijk, T. A. (2015). *Critical Discourse Analysis*. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (2nd ed., Vols. 466-485). John Wiley & Sons.

- Wang, X., & Vergeer, M. (2024). Effect of Social Media Posts on Stock Market During COVID-19 Infodemic: An Agenda Diffusion Approach. *SAGE Open*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/21582440241227688>
- Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202-221. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.661>
- Wodak, R. (2015). *Methods of Critical Discourse Studies*, 3rd edition.
- Yang, L. (2024). Exploring Media Framing of the Monkeypox Pandemic in Mainstream and Social Media: A Framing Theory Analysis. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 14598 LNCS, 135-149. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-57867-0\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-031-57867-0_10)
- Yu, Y., Nartey, M., & Chen, J. (2024). A Critical Discourse Analysis of Resistance to Climate Change in China's English-Language News Media. *Asian Studies Review*, 48(3), 579-596. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2272295>
- Zheng, S., Zhang, Y., Wang, L., Wu, S., & Chen, B. (2023). Exploring Agenda Setting Through Social Media by Text Mining and Data Analysis: A Case Study of Roe V. Wade Overturn and Discussions on Twitter. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 5(1), 688-699. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/5/20221008>